



## **DAMPAK SISTEM TANAM PAKSA TERHADAP DINAMIKA PEREKONOMIAN PETANI JAWA TAHUN 1830**

Agusty Nurqirani Juliana<sup>1</sup>, Usmaedi<sup>2</sup>, Muhammad Faizal Ahsan<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Pendidikan Sejarah/Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan/Universitas Setia Budhi Rangkasbitung/Lebak, Indonesia

<sup>3</sup>Pendidikan Bahasa Indonesia/Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan/Universitas Setia Budhi Rangkasbitung/Lebak, Indonesia

### **RIWAYAT ARTIKEL**

*Sejarah artikel:*

Diterima 19 Maret 2025

Diterima dalam bentuk

revisi 9 April 2024

Publish 01 Juli 2025

### **ABSTRAK**

Sistem Tanam Paksa telah mengenalkan petani pada sistem tanam yang lebih modern. Kondisi ini membuat ekonomi pangan memiliki pondasi yang semakin mantap. Pada masa ini pula terbuka peluang bagi tumbuhnya ekonomi masyarakat tani. Perekonomian subsisten perlahan bergeser menjadi perekonomian uang. Akan tetapi bagaimanapun penyimpangan dalam pelaksanaan Tanam Paksa pada akhirnya semakin menambah derita penduduk jajahan.

*Kata kunci:*

*Tanam Paksa, Perekonomian,  
Petani Jawa*

### **PENDAHULUAN**

VOC (*Vereenigde Oost-Indische*) atau Persekutuan Dagang Hindia Belanda yang didirikan pada bulan Maret 1602 menjadi awal cikal bakal penguasaan Belanda atas wilayah Indonesia. VOC berdiri atas keinginan kongsi-kongsi dagang dari Belanda yang berdatangan ke Indonesia dalam kurun waktu tahun 1595 sampai 1600-an. Kongsi dagang itu berasal dari Amsterdam, Middelburg, Rotterdam, Zeeland, Delft, Enkhuizen, dan Hoorn (Sartono Kartodirdjo, 1993:70). Pimpinan VOC terdiri dari tujuh belas anggota yang merupakan perwakilan dari kongsi-kongsi dagang yang disebut sebagai *Heeren Zeventien* atau Tuan-tuan XVII.

Menjelang akhir abad XVIII VOC mengalami kemunduran. Moralitas pegawai-pegawai VOC mulai menurun karena rendahnya kesejahteraan yang mereka terima. Praktik-praktik korupsi mulai marak dan menggerogoti pondasi kongsi dagang Hindia

[julianaagustinurkirana@gmail.com](mailto:julianaagustinurkirana@gmail.com)

Belanda ini. Selain itu kas negeri Belanda juga sedang mengalami kekosongan akibat perang. Keuntungan VOC banyak tersedot untuk menutup kesulitan keuangan ini. Maka pada tanggal 31 Desember 1799, VOC yang hampir berusia dua abad harus menerima akhir hidupnya. Sejak 1 Januari 1800 kekuasaan di Hindia Belanda beralih dari VOC ke pemerintah kolonial Belanda.

Bubarnya VOC bukan berarti penderitaan negara jajahan berakhir. Eksploitasi terhadap kekayaan nusantara terus berlangsung. Sistem eksploitasi yang dilakukan VOC dengan pemerintah kolonial memiliki persamaan yaitu adanya penyerahan wajib hasil-hasil pertanian meskipun cara yang agak berbeda. Pemerintah kolonial mengadakan hubungan dengan para petani secara langsung dan lebih intens untuk menjamin arus tanaman ekspor dalam jumlah yang dikehendaki.

golongan konservatif yang menguasai pemerintahan kolonial pada masa awal abad XIX memandang politik eksploitasi dengan penyerahan paksa peninggalan VOC sangat cocok untuk mengelola Hindia Belanda sebagai daerah *wingewest* atau daerah yang menguntungkan negara induk. Sistem penyerahan paksa itu dapat diterapkan dalam usaha eksploitasi produksi pertanian tanah jajahan yang langsung ditangani oleh pemerintah kolonial. Eksploitasi produksi pertanian yang dilakukan oleh pemerintah kolonial ini diwujudkan dalam bentuk perkebunan negara. Sejak itulah Hindia Belanda memasuki masa sistem tanam wajib atau tanam paksa (*cultuurstelsel*).

Sistem tanam paksa dilaksanakan melalui alat birokrasi pemerintah yang berfungsi sebagai pelaksana langsung dalam proses mobilisasi sumber perekonomian berupa tanah dan tenaga kerja. Sistem tanam paksa lebih mengutamakan peningkatan hasil produksi tanaman ekspor yang sangat laku di pasaran Eropa. Untuk itu pemerintah kolonial memperkenalkan tanaman ekspor kepada petani di Jawa. Pelaksanaan tanam paksa dalam kenyataannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku pada masa itu. Sistem tanam paksa lebih menguntungkan pemerintah kolonial dan semata-mata sebagai bentuk eksploitasi (Robert van Niel dalam Anne Booth, dkk., 1988:101).

Meskipun dapat ditarik suatu konklusi secara umum bahwa sistem tanam paksa membawa penderitaan, akan tetapi sistem tanam paksa membawa dampak besar bagi perubahan sosial ekonomi petani Jawa. Subsistensi yang sejak dulu menjadi warna dalam perekonomian petani Jawa mengalami pergeseran. Secara perlahan namun pasti sistem tanam paksa telah memperkenalkan perekonomian uang yang kemudian semakin berkembang dengan masuknya modal asing dalam koridor ekonomi liberal.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi literatur dengan analisis deskriptif kualitatif. Pembahasan akan difokuskan pada sejarah kemunculan sistem tanam paksa dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaannya, serta dampak system tanam paksa pada petani Jawa pada tahun 1830.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah kolonial Belanda yang pertama kali setelah runtuhnya VOC dipimpin oleh Dirk van Hogendorp (1799-1808). Dalam pemikiran kaum liberal kondisi rakyat yang tertinggal disebabkan oleh sistem feodal yang mematikan potensi rakyat. Hogendorp mengusulkan agar kedudukan bupati dan penguasa lokal diatur kembali, penguasaan tanah dicabut dan dikembalikan pada rakyat untuk ditanami secara bebas (Sartono Kartodirdjo, 1993:290). Rakyat bebas memilih jenis tanaman dan menjualnya. Penyerahan wajib (*verplichte leveranties*) dalam bentuk pajak berupa hasil bumi dan uang kepala. Sistem ini diharapkan mendorong rakyat lebih giat menanam dan menghasilkan beras, kopi, lada, kapas, coklat, dan minyak kelapa untuk ekspor.

Pasca penguasaan Inggris di Hindia Belanda (1811-1816), pemikiran ekonomi politik di daerah jajahan mulai bergeser dari politik liberal ke pihak konservatif (Sartono Kartodirdjo, 1993:305). Sistem pajak tanah dan perkebunan bebas selama tiga puluh tahun banyak mengalami hambatan. Struktur sosial yang sangat feodal di Jawa menjadi pemicu utamanya. Pada waktu sistem pajak tanah diberlakukan (1810-1830) dan sistem penyerahan wajib di Jawa dihapuskan, daerah Priangan menjadi daerah perkecualian. *Preanger Stelsel* berupa wajib tanam kopi yang dilaksanakan di daerah Priangan membawa keuntungan besar bagi Belanda. Hal ini kemudian menjadi *pilot project* bagi pelaksanaan sistem tanam paksa yang dicetuskan oleh van den Bosch.

Johannes van den Bosch, diangkat sebagai gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1830 sebagai pengganti Du Bus de gisignies. Bosch mendapat tugas untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor yang tidak dapat dicapai oleh pemerintahan sebelumnya. Tugas ini sangat mendesak, karena keadaan keuangan di negara Belanda sangat parah. Satu-satunya jalan terbaik untuk menyelesaikan beban utang negara yang besar itu ialah memanfaatkan kekayaan di daerah jajahannya, Hindia Belanda. Solusi yang dicetuskan oleh Bosch ialah pelaksanaan sistem tanam paksa (*Cultuurstelsel*).

Sejak tahun 1830, sistem tanam paksa mulai diterapkan sebagai upaya menghidupkan kembali sistem eksploitasi dari masa VOC yang berupa penyerahan wajib. Ikatan feodal dan hubungan patronklien menunjukkan masih adanya pengaruh yang kuat. Maka Bosch memandang bahwaproses peningkatan produksi tanaman ekspor dapat dilaku- kan melalui pemulihan sistem penyerahan wajib.

Sistem tanam paksa merupakan penyatuan antara sistem penyerahan wajib

dengan sistem pajak tanah. Ciri pokok sistem tanam paksa terletak pada kewajiban rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk hasil tanaman pertanian merekadan bukan dalam bentuk uang seperti yang berlaku dalam sistem pajak. Pungutan pajak dalam bentuk barang (*in natura*) akan membuat produksi tanaman perdagangan (*cash crops*) dapat dikumpulkan dalam jumlah besar. Produksi tanaman ekspor yang berhasil dikumpulkan itu, diharapkan akan dapat dikirimkan ke negeri induk, yang kemudian dipasarkan di pasaran dunia secara luas, baik di Eropa maupun Amerika. Pemasaran produksi tanaman ekspor di pasaran dunia itu akan mendatangkan keuntungan besar baik bagi pemerintah maupun para pengusaha di negeri Belanda, sehingga utang negeri induk segera dapat dibayar (Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, 1991:54).

Dalam pelaksanaan sistem tanam paksa, van den Bosch menghendaki peningkatan campur tangan orang Eropa dalam proses produksi. Rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor yang diminta pemerintah di tanah-tanah milik mereka sendiri. Penyerahan hasil tanaman, menurut teorinya, dilakukan atas kemauan penduduk sendiri namun tentu dalam kenyataannya tidaklah demikian. Tuntutan kerja paksa (kerja rodi) atau pekerjaan tanam paksa diwajibkan bagi penanaman kopi yang hampir semuanya dilakukan di tanah yang belum digarap, meskipun pada praktiknya penanaman juga dilakukan di lahan pertanian yang sudah digarap.

Dalam teorinya sebagai upah atas penanaman tanaman yang diminta pemerintah maka penduduk dibebaskan dari kewajiban membayar pajak tanah. Pajak nantinya dipungut bukan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk *in natura* atau dengan memberikan tenaganya untuk bekerja. Hal ini dianggap lebih sesuai dengan sifat rumah tangga desa yang ingin dipertahankan sebagai rumah tangga produksi dan dicegah agar tidak menjalankan rumah tangga uang (Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, 1991:55).

Tujuan pelaksanaan sistem tanam paksa mengikuti pola kekuasaan tradisional masyarakat Jawa. Kaum tani digerakkan untuk bekerja menghasilkan tanaman ekspor. Untuk itu diharapkan para kepala desa dan birokrasinya mampu menggunakan kekuasaan mereka untuk menggerakkan orang-orang bekerja dengan cara baru. Masyarakat desa dipaksa menyerahkan pemakaian sebagian tanah mereka untuk penanaman tanaman keperluan pemerintah dan sebagian besar masih untuk menanam padi keperluan masyarakat. Tujuannya ialah agar masyarakat Jawa tetap statis secara ekonomi agraris (Robert van Niel dalam Anne Booth, dkk., 1988:116). Kenyataannya hal ini tidaklah demikian.

Sasaran pokok dari sistem tanam paksa yaitu memperoleh produksi setinggi-tingginya. Sasaran ini justru menimbulkan banyak terjadi penyimpangan di lapangan yang menimbulkan tekanan berat terhadap rakyat pedesaan. Penyimpangan ini didasari pada “kejar setoran” yang dilakukan oleh para birokrat lokal. Sistem tanam paksa berjalan dengan berbagai kesukaran dan perlakuan yang menyakitkan terhadap kaum petani Jawa. Akan tetapi pada sisi lain pandangan sejarah makin lama makin mencoba memperlihatkan kerangka perubahan sosial-ekonomi masyarakat Jawa yang lebih luas (Robert van Niel dalam Anne Booth, dkk., 1988:104-105). Aturan

mengenai pelaksanaan sistem tanam paksa pada dasarnya masih dapat diterima karena masih berada dalam koridor-koridor kewajaran yang masuk akal. Permasalahannya ialah dalam praktiknya sistem tanam paksa menyimpang dari aturan yang ditetapkan. Menurut Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo (1991:56) dalam Lembaran Negara (*Staatsblad*) tahun 1834, nomor 22, sistem tanam paksa dijalankan dengan

ketentuan sebagai berikut :

1. Melalui persetujuan, penduduk menyediakan sebagian tanahnya untuk penanaman tanaman perdagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa.
2. Tanah yang disediakan untuk penanaman tanaman perdagangan tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang dibutuhkan untuk menanam padi.
4. Bagian tanah yang ditanami tanaman perdagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
5. Hasil tanaman perdagangan yang berasal dari tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda; apabila nilai hasil tanaman perdagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat.
6. Kegagalan panen tanaman perdagangan harus dibebankan kepada pemerintah, terutama apabila kegagalannya bukan disebabkan oleh kelalaian penduduk.
7. Penduduk desa akan mengerjakan tanah mereka dengan pengawasan kepala-kepala mereka, dan pegawai-pegawai Eropa membatasi pengawasannya pada segi teknis dan ketepatan waktu dalam pembajakan tanah, panen, dan pengangkutan.

Sistem tanam paksa dilaksanakan melalui saluran birokrasi pemerintah, yang melibatkan pejabat-pejabat pribumi dan Eropa. Pejabat pribumi mencakup para bupati hingga kepala desa. Pejabat Eropa meliputi para Residen, Asisten Residen, Kontrolir, dan Direktur Tanaman, yang bertugas sebagai pengawas jalannya pelaksanaan sistem tanam paksa. Ini berarti sistem tanam paksa menyandarkan diri pada sistem tradisional dan feodal dengan perantaraan struktur kekuasaan lama (Sartono Kartodirdjo, 1993:306). Sistem liberal yang sempat dianut berarti ditinggalkan sama sekali.

Jenis tanaman wajib yang diperintahkan untuk ditanam ialah kopi, tebu, dan indigo (bahan pewarna). Tanaman lain yang ikut ditanam dalam skala kecil, antara lain tembakau, lada, teh, dan kayu manis. Jenis tanaman itu ditanam pada seperlima bagian milik tanah penduduk, yang diminta secara paksa. Pada perkembangannya tidak hanya seperlima bagian namun bisa terjadi hampir seluruh tanah pertanian ditanami tanaman-tanaman wajib. Kopi lebih banyak ditanam di tanah-tanah yang belum digarap, sehingga butuh pengerahan tenaga rakyat untuk membuka dan menggarap lahan tersebut. Maka dalam pelaksanaan sistem tanam paksa, penduduk masih



diminta untuk menyerahkan tenaga kerja wajib atau kerja paksa (*heerendiensten*) untuk mengerjakan pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah, seperti membuka lahan, pembuatan atau perbaikan jalan, saluran irigasi, pengangkutan dan berbagai pelayanan kerja lainnya. Menurut peraturan, kerja wajib dilakukan selama 66 hari dalam satu tahun (Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, 1991: 56).

Pelaksanaan sistem tanam paksa sebagian besar dilakukan di Jawa, hanya sebagian kecil di luar Jawa. Selain sebagai pusat kedudukan pemerintah kolonial Belanda, Pulau Jawa menjadi tempat pelaksanaan sistem tanam paksa yang paling berhasil dan paling disalahgunakan. Salah satu daerah di luar Jawa yang mengalami keberhasilan pelaksanaan tanam paksa yaitu Sumatera Barat berupa penanaman kopi (Kenneth R. Young dalam Anne Booth, dkk., 1988:136).

#### **Dari Ekonomi Subsisten ke Monetisasi**

Petani Jawa sejak awal terbentur oleh moral ekonominya yang subsisten. James c. Scoot (1981:26) menjelaskan bahwa petani menganut prinsip “utamakan selamat”. Para petani lebih senang meminimalisir kemungkinan terjadinya suatu bencana (gagal panen) daripada meningkatkan penghasilannya. Dalam memilih bibit dan cara-cara bertanam para petani lebih menghindari risiko daripada melakukan spekulasi untuk meningkatkan penghasilannya. Untuk itulah petani lebih senang menanam tanaman pangan daripada tanaman perdagangan apalagi tanaman ekspor.

Sistem tanam paksa telah mengubah pola yang sejak dulu diyakini oleh para petani. Mereka dipaksa menanam tanaman ekspor untuk kepentingan ekonomi Belanda. Hal ini otomatis mengurangi produksi tanaman pangan mereka. Peralihan dari produksi subsistensi ke produksi komersil hampir selalu memperbesar risiko. Selain itu produksi komersil dalam sistem tanam paksa tidak menjamin persediaan pangan bagi keluarga. Akibat dari sistem tanam paksa maka memaksa petani untuk mengubah pola pikirnya.

Perubahan dalam sistem kerja juga telah mengenalkan sistem ekonomi uang (*monetisasi*) ke dalam lingkungan kehidupan pedesaan agraris (Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, 1991:68). Kehidupan perekonomian yang semula masih tradisional dan subsisten secara berangsur-angsur berkenalan dengan ekonomi uang melalui komersialisasi produksi pertanian dan pasaran kerja. Sistem tanam paksa telah menjadi pintu masuk peredaran uang ke daerah pedesaan. Sistem ekonomi uang ini membuat para petani mulai tergantung pada dunia luar. Produksi pertanian dirasakan sebagai komoditi untuk ekspor dan pasar dunia. Sistem ini mulai menggoyang sistem ekonomi subsisten sebagai ekonomi tradisional yang bersifat tertutup dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri bagi petani.

Mengenai pembentukan modal yang muncul akibat sistem tanam paksa, tentu tidak lepas dari perkembangan sistem ekonomi uang di desa. Dalam hal ini merupakan aspek yang lebih melibatkan orang Eropa dan cina, daripada penduduk pribumi. Para kontraktor gula pemerintah merupakan pemimpin-pemimpin dalam pembentukan modal ini. Masuknya modal ini lebih didasari pada berkembangnya swasta yang sifatnya lebih liberal, dibandingkan sistem pemerintah yang berbelit-belit. Perkembangan modal swasta akan lebih tampak sesudah tahun 1880, ketika sistem

tanam paksa betul-betul dibubarkan secara resmi (Robert van Niel dalam Anne Booth, 1988 : 131). Peralihan sistem tanam paksa ke sistem perusahaan swasta, sejajar dengan beralihnya kebijakan politik kolonial dari tangan kaum konservatif ke tangan kaum liberal yang menentang sistem eksploitasi oleh negara/pemerintah. Meskipun sistemnya berbeda, akan tetapi tujuannya sama yakni menggali sumber kekayaan tanah jajahan untuk keuntungan negeri Belanda. (Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, 1991 : 72)

Pada akhirnya, sistem ekonomi modern yang muncul akibat tanam paksa meskipun berhasil mendorong Jawa makin terlibat dalam perdagangan internasional karena pertumbuhan yang mantap di bidang ekspor, namun di sisi lain telah mengeksploitasi habis-habisan sistem ekonomi subsistens yang menjadi basis ekonomi kaum tani. Eksploitasi lewat sistem tanam paksa bersifat brutal dan mengakibatkan petani Jawa menderita kemiskinan dan kelaparan. Struktur sosial dan ekonomi Jawa nyaris dihancurkan. Kemiskinan dan kelaparan menjadi masalah pokok penduduk Jawa. Teori involusi pertanian Clifford Geertz yang menjelaskan proses kemiskinan struktural di Jawa tampak relevansinya. Pertambahan penduduk Jawa, berkurangnya lahan pertanian dan perluasan perkebunan Eropa menjadi penyebab kemiskinan di Jawa.

## KESIMPULAN

Pada tahun 1930, negeri Belanda memiliki beban utang yang besar, karena itu mencari pemecahannya di daerah jajahannya, yaitu Indonesia. Pada masa ini juga mulai terjadi pergeseran pemikiran dari politik liberal ke politik konservatif. Maka gagasan pemecahan bagi masalah yang dihadapi Belanda bersumber pada kebijakan eksploitasi yang pernah diterapkan di Hindia Belanda. Sistem tanam paksa yang dicetuskan oleh van den Bosch memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan produksi tanaman ekspor agar dapat menguasai pasaran dunia dan mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya.

Sistem tanam paksa dijalankan dengan ketentuan tertentu yang diusahakan tidak merugikan kepentingan rakyat. Akan tetapi dalam praktik, banyak dilaporkan sebaliknya. Penyelenggaraan sistem tanam paksa yang memanfaatkan birokrat pribumi desa sebagai perantara, merupakan salah satu sumber penyimpangan dalam praktik tanam paksa di tingkat desa.

Secara garis besar dampak dari sistem tanam paksa di Jawa ialah selain mempengaruhi kepemilikan tanah dan munculnya tenaga buruh yang murah, masih ditambah satu hal lagi yaitu terjadinya pergeseran ekonomi petani Jawa. Pola pikir menghindari risiko mau tidak mau harus ditanggalkan karena tuntutan pelaksanaan sistem tanam paksa. Lahirnya pembentukan modal di desa dengan adanya sistem ekonomi uang (*monetisasi*) perlahan juga menyingkirkan sistem ekonomi petani Jawa yang sebelumnya bersifat subsisten.

## REFERENSI

Sartono Kartodirdjo. 1993. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium Jilid 1*. Jakarta: Penerbit PT gramedia Pustaka Utama.

Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo. 1991. *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.

Scott, James c.. 1981. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.

Niel, Robert van. 1988. *Warisan Sistem Tanam Paksa bagi Perkembangan Ekonomi Berikutnya*, hlm. 99-135. Dalam Anne Booth, dkk. (Eds). *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.